beberapa perusahaan MNCnya. Bahkan James Connaughton, penasehat senior Presiden George W Bush mengenai lingkungan, berbalik menyerang negara anggota G8 lainnya dengan memberikan pernyataan, bahwa pertemuan G8 tidak seharusnya menjadi forum yang mendikte anggotanya. Berhubungan dengan itu pula dibahas stabilitas keamanan di Timur Tengah serta kondisi suplai minyak pada negara-negara G8, terutama dengan invasi militer AS di Irak yang berujung pada ekplorasi minyak bumi secara besar-besaran.

Ketegangan antara AS dan Rusia masih berlanjut di Heiligendam, hal ini berkaitan dengan penempatan sistem rudal pertahanan AS di dua negara bekas negara komunis di Eropa Timur, Ceko dan Polandia. Presiden Rusia, Alexander Putin menolak program pertahanan AS tersebut karena dianggap akan mengancam keamanan negerinya. Sedangkan reaksi AS masih seperti biasa, mereka menolak untuk menghentikan program pertahanan tersebut. Tidak ingin terus tersinggung dengan program invasi Iraknya, AS berbalik membawa isu Kosovo ke meja pertemuan. Apalagi pada jamuan makan malam menjelang pertemuan resmi yang dihadiri oleh setiap pemimpin negara, Bush melontarkan kritik pada pemerintah Rusia dan mengeluarkan pernyataan bahwa Putin dianggap menghambat pemberdayaan warga negara Rusia yang berimplikasi pada proses pengembangan di negara tersebut. Nampaknya setelah pertemuan G8 ini ketegangan antara AS dan Rusia akan semakin memanas.

Sebelum berlangsung pertemuan puncak G8 di Heiligendamm, terlebih dahulu diadakan beberapa pertemuan tingkat menteri G8 yang telah dimulai sejak awal tahun 2007. Penuntasan kemiskinan dan pembangungan ekonomi di Afrika yang menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan puncak G8, telah dibicarakan sebelumnya ketika berlangsung pertemuan antar menteri keuangan G8 yang berlangsung di Postdam, 19 Mei 2007. Dalam *statement* yang dikeluarkan setelah pertemuan itu, G8 bekerja sama dengan AfDB (African Development Bank) mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di Afrika terutama di negara-negara yang telah dan sedang mengalami konflik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong dengan membuka pasar dari investor industri yang hendak menanamkan modalnya di negara-negara Afrika termasuk di dalamnya program perbaikan infrastruktur yang mendukung masuknya modal. Dengan kata lain agenda neoliberal sedang melenggang di benua hitam.

Kemudian berkaitan pula dengan perbaikan lingkungan yang didengungkan oleh negara G8 terutama kaitannya di Afrika, salah satu program yang dilakukan untuk efisiensi itu ialah dengan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi nuklir. Untuk mewujudkannya selain akan memberikan pinjaman (baca: hutang) kepada negara-negara Afrika, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi energi diberikan keleluasaan untuk berinvestasi. Pada pertemuan puncak G8 di Heiligendamm, program ini tidak lagi hanya sebagai proposal namun telah sampai pada persetujuan pemberian pinjaman oleh pemimpin negara G8. Karena itu dalam pertemuan di Heiligendamm, enam presiden dari negara Afrika diundang untuk hadir.

Sebagai misionaris neoliberal, perilaku G8 tidak berbeda dengan institusi keuangan internasional semisal IMF atau WTO. Agenda yang dicanangkan mereka setiap tahunnya ialah membuka pasar sebesar mungkin di negara-negara berkembang. Dengan bantuan hutang yang diberikan, G8 melakukan intervensi terhadap negara penerima bantuan untuk memasukkan agenda pasar bebas agar diterapkan di negara tersebut. Dengan memaksakan perdagangan bebas, krisis pertanian, dan bebas bergeraknya perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di manapun telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan.

Pertemuan G8 tahun ini sepakat untuk menggelontorkan dana sebesar AS $60 miliar untuk menanggulangi kemiskinan, setengah dari jumlah tersebut dijanjikan oleh AS. Meski kesepakatan ini akan membantu mengatasi kemiskinan, tidak memecahkan persoalan kemiskinan. Negara-negara miskin yang terlilit utang yang sangat berat, Highly Indebted Poor Countries (HIPC) berjumlah 43 negara. Di samping itu, penghapusan utang, meskipun 100%, mensyaratkan negara-negara miskin tersebut menyelesaikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper/PRSP) yang memaksa negara-negara ini menerapkan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.

Dana yang dikeluarkan tersebut ialah hutang belum termasuk bunga yang dipinjamkan kepada negara-negara berkembang. Kemiskinan masih menjadi kendala serius, indikatornya setiap 3,5 detik seorang anak meninggal karena kelaparan di negara miskin. G8 berkilah bahwa masih begitu besarnya angka kemiskinan karena negara-negara penerima bantuan tidak dengan benar melakukan perbaikan sesuai dengan instruksi G8. Ketidakseriusan G8 untuk memerangi kemiskinan adalah bukti bahwa hutang yang mereka berikan hanyalah jebakan agar agenda neoliberal bisa mencapai setiap jengkal tanah di bumi.

Bertemunya 8 negara kapitalis raksasa ini bukanlah untuk memperbaiki ketimpangan di dunia ataupun membantu negara miskin. G8 tidak lebih dari bentuk representasi kapitalisme berselubung negara dan pemerintahan. Dalam setiap pertemuannya, G8 tidak hanya menghadirkan delapan negara kapitalis tadi, namun juga selalu mengundang puluhan ribu demonstran untuk berdemonstrasi menggalang kekuatan menghentikan pertemuan negara-negara yang mengaku sebagai pemimpin dunia ini.

Sebagaimana pertemuan-pertemuan institusi keuangan internasional lainnya, kongres G8 di Rostock, tanggal 6–8 Juni 2007, juga menghadapi demonstrasi besar-besaran di mana sekitar 30.000 orang terlibat di dalamnya. Dan sampai tengah malam 8 Juni, tercatat lebih dari 1500 demonstran ditangkap aparat, dan ribuan lainnya mengalami luka-luka karena tindak represif berlebihan dari aparat polisi. ★

PERANG KELAS YANG TERSEMBUNYI

PETANI SUKABUMI VERSUS KORPORASI

Persoalan agraria memang belum berhenti, klaim tanah disertai kekerasaan terhadap petani oleh perusahaan dan pemerintah terus berulang. Proyek SBY–JK tentang pemberian lahan secara gratis melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) sepertinya bukan jawaban atas persoalan tersebut. Konversi lahan pertanian menjadi pabrik, perkebunan negara dan pembangunan infrastruktur seakan biasa namun sebenarnya menciptakan banyak konflik dibaliknya. Terdapat ratusan atau ribuan kasus serupa yang telah terjadi, dari yang terberitakan seperti Pasuruan hingga yang tersembunyi seperti kasus di Banyuwangi. Namun terlepas dari terberitakan atau tidaknya konflik tersebut pelaku kekerasan dan korbannya masihlah sama. Ini adalah perang kelas yang tidak akan pernah berakhir.

Kasus Lengkong, Sukabumi

Di Lengkong Sukabumi semenjak tahun 1989 hingga tahun 1993 sebanyak 256 kepala keluarga petani Simpeunan mulai membuka lahan seluas 101 Ha bekas perkebunan milik Belanda yang terlantar. Warga memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian. Lalu pada tahun 1994 warga secara kolektif mengajukan permohonan kepemilikan untuk tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun permohonan ditolak karena berdasarkan data BPN lahan yang sampai hari itu dikelola oleh warga merupakan areal perkebunan PT JA Wattie yang hak guna usahanya dipegang oleh sebuah perusahaan perkebunan, The Kali Doeren Estate N.V, yang berakhir pada tahun 1998. Semenjak permohonan warga ditolak pihak perkebunan mulai melakukan intimidasi dan bekerjasama dengan pemerintah serta aparat keamanan untuk mulai mengusir para petani dari lahan garapannya. Dan seperti biasa, sesuai tradisi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyudutkan setiap protes, warga yang melakukan perlawanan dituding sebagai kelompok DI/TII bahkan PKI.

KRONOLOGI

10 Oktober 2006

Warga menerima surat dari Kepala Desa Kerta Jaya. Isinya menyatakan bahwa pihak perkebunan akan melakukan penerasan di lahan pemukiman warga, padahal proses legal belum selesai.

11 Oktober 2006

Warga didatangi seorang aparat Polsek Simpeunan utusan dari pihak perusahaan yang memberitahu bahwa hari itu akan dilaksanakan penerasan. Sebanyak 250 karyawan dan 42 polisi dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan penerasaan tersebut. Warga yang menolak dan melakukan protes tidak digubris oleh pihak kepolisian. Mereka hanya menyatakan bahwa penerasan telah disahkan oleh Bupati Sukabumi melalui suratnya. Karena aktivitas tersebut tanaman milik warga jadi rusak.

12 Oktober 2006

Pada pukul 08.00 di blok Cikerud salah seorang karyawan perusahaan beserta 6 orang lainnya melakukan penerasan. Namun aksi tersebut diketahui oleh warga setempat yang lantas meminta mereka untuk segera menghentikan penerasan. Sementara warga yang lainnya berkumpul di blok Cikanere di mana sedang terjadi aktivitas penerasan. Warga yang berusaha menghentikan penerasan dihadang oleh barisan Dalmas. Terjadi aksi dorong mendorong, polisi yang berusaha menangkap seorang petani dihalangi-halangi oleh warga. Polisi melepaskan tiga tembakan peringatan untuk membubarkan massa, namun itu tidak membuat warga ketakutan dan malah membuat mereka semakin tidak terkendali. Dalam kericuhan tersebut seorang petani perempuan berhasil mengagalkan upaya penangkapan tiga tokoh warga tani oleh polisi dan sejumlah warga menghadang polisi yang berusaha memburu salah seorang warga. Tidak lama kemudian pimpinan kepolisian menarik pasukannya karena merasa kewalahan oleh aksi warga yang solid.

27 November 2006

3 orang petani Simpeunan mendapatkan surat panggilan dari PN Sukabumi. Pemanggilan itu terkait dengan perlawanan warga terhadap aksi penerasan yang dilancarkan oleh PT JA Wattie di atas lahan milik mereka.

30 November 2006

Kapolres Sukabumi menangkap ketiga orang petani SimpeunanAmas (40), Sarip (60) dan Saep (60) setelah sebelumnya mendapatkan surat panggilan. Pengadilan Negeri memvonis mereka 1 tahun penjara atas perjuangan mereka mempertahankan tanah.

31 Mei 2007

Setelah kasus seakan dibiarkan mengambang selama setengah tahun, mendadak kembali seorang warga Simpeunan ditangkap polisi Sukabumi saat sedang melakukan ibadah di dalam mesjid. Penangkapan tersebut dibarengi pemukulan, lantas diinjak, ditendang kemudian ditelanjangi.

Pasca penangkapan

Warga kembali memulai protesnya atas apa yang dilakukan polisi terhadap salah satu anggota warga Simpeunan tersebut. Pasukan Brimob juga mulai diturunkan untuk "mengamankan" situasi, tetapi toh bagaimanapun juga, warga, termasuk kaum perempuannya yang kini mengambil alih garda depan dalam aksi protes, bukanlah mereka yang pertama kali hadir menciptakan ketidakamanan. Hingga kini, perjuangan mereka masih berlanjut. ★

APOKALIPS

PO Box 1419, Bandung 40014
tim.apokalips@gmail.com
apokalips.org (*-anization*)

TIM REDAKSI:
Sumadikarta, Makhdum Ibrahim, Rikki Rikardo, Bambang Sutedjo, Munaa, Petrus Soemitro, Ari Wibowo, Ahmad Kosasih

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komuniti Melawan Neoliberalisme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komuniti-komuniti independen sebagai ikhtiar melawan gelombang imperialisme gaya baru yang semakin hari semakin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang membuat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin bertebaran di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin sedikit yang mampu mengaksesnya. Hidup jadi tak lebih dari sekedar menjadi urusan makan, minum, berkembang biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah kehilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kembali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.



NOMOR 07 – JULI 2007 | PERIODIKAL 2 BULANAN
GRATIS SEPERTI BUKU *HABIS MANIS SEPAH DIBUANG* YANG DIBAGIKAN DI CENDANA SAAT ULTAH SUHARTO TANGGAL 8 JUNI



***"Kenyataan terus menerus merusak hidupku."* –Calvin and Hobbes**

Editorial

Awal bulan Juni lalu, di Rostock, Jerman, dilaksanakan sebuah pertemuan 8 negara-negara industri besar untuk memperluas ekspansi ekonominya ke seluruh penjuru dunia. Dari proyek pemberian hutang hingga program-program infrastruktur yang diajukan kepada para negara-negara penghutang—semua dibahas dalam pertemuan tersebut dengan dalih pengentasan kemiskinan melalui reformasi ekonomi, peningkatan iklim investasi. Apapun akan dilakukan demi menarik investor. Tak terkecuali dengan apa yang kemudian terjadi di Indonesia, demi reformasi ekonomi itulah, setelah tahun lalu para pekerja ditekan dengan revisi UU 13/2003, kini diterbitkanlah RUU Penanaman Modal yang tak kalah kontroversial. Privatisasi demi korporasi dilepas tanpa kendali. Di mana-mana dengan dikawal oleh barisan TNI dan polisi, pencaplokan tanah-tanah juga semakin sering terjadi. Dari Pasuruan di mana perjuangan melawan dominasi harus dibayar dengan nyawa beberapa orang hingga konflik agraria di Sukabumi yang tak terberitakan di media resmi, semua seakan harus dibayar, demi kejayaan korporasi. Korporasi-korporasi yang sama yang dalam sejarah perjalanannya selalu menyimpan rentetan daftar kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang legal maupun ilegal. Mari berdoa bagi yang telah mati dan berjuang habis-habisan bagi yang hidup. Kita bukan berjuang demi rakyat, tapi kita berjuang demi bertahan hidup, untuk membangun surga di atas bumi. ★

POPULASI VERSUS KORPORASI

PERJUANGAN MELAWAN (RANCANGAN) UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI PERJUANGAN GLOBAL MELAWAN DOMINASI KORPORASI

Maret lalu pebisnis lokal yang merangkap wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla, melakukan pertemuan khusus dengan Perdana Menteri Inggris, Lord Powell, untuk berbincang mengenai reformasi bisnis di Indonesia. Inggris adalah negara yang memiliki kepentingan sangat besar terhadap penanaman modal di Indonesia. Inggris sendiri sejak tahun 2005 memiliki sedikitnya 104 proyek di berbagai sektor dengan nilai investasi terbesar kedua di negeri ini setelah Singapura (www.jatam.org). Tapi Inggris tidaklah satu-satunya, Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank), Japan Bank for International Cooperation, semuanya secara bergantian mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Penanaman Modal (RUU PM) untuk mendongkrak reformasi bisnis di Indonesia. Lantas mengapa reformasi bisnis perlu dilakukan?

Latar Belakang Global

Di Indonesia, kemiskinan mencapai angka 17.75% dari populasi sejumlah 222 juta jiwa (www.liputan6.com), sementara pengangguran mencapai 10.4% dari seluruh tenaga kerja produktif di Indonesia (www.tempointeraktif.com). Tidak hanya di Indonesia, di Bolivia, hanya sekitar 400.000 orang yang memiliki pekerjaan formal—dari seluruh populasi sejumlah 8.8 juta jiwa. Di Malawi, 50.000 dari populasi sejumlah 12 juta jiwa. Di Mozambique, 350.000 dari 20 juta jiwa populasi (*Doing Business 2007 Full Report*). Daftar pengangguran di tingkat global ini semakin panjang apabila dibeberkan secara keseluruhan, dan tentu hal ini juga berimbas pada semakin tingginya angka kemiskinan ekonomi di tengah masyarakat—yang pada gilirannya akan berimbas pada tingginya angka kriminalitas dan kekacauan sosial lainnya.

Bagi Bank Dunia, semua hal di atas dapat ditanggulangi dengan cara mereformasi bisnis, dengan mempermudah bisnis-bisnis formal untuk membuka usaha-usaha barunya, yang tentu akan berarti terbukanya semakin banyak lapangan pekerjaan. Atas hal tersebut, menurut mereka, yang paling mendapatkan keuntungan adalah perempuan dan pekerja muda—kedua kelompok sosial inilah yang menempati posisi terbanyak dari setiap tabel angka pengangguran. Atau dengan kata lain, untuk mengatasi semua masalah di atas, keran-keran investasi harus dibuka besar-besaran, karena hanya dengan cara tersebutlah maka bisnis-bisnis akan dapat berkembang bebas.

Dalam laporan Bank Dunia tentang iklim bisnis global, *Doing Business 2007,* Singapura menempati ranking pertama sebagai negara yang paling ramah terhadap pembukaan keran investasi, sementara Indonesia yang menempati ranking 131 di tahun 2006, tahun ini turun ke ranking 135. Hal ini dianggap preseden buruk bagi pemerintah Indonesia dalam kancah ekonomi internasional.

Atas dasar tersebut di ataslah maka RUU PM hadir di Indonesia, yang sesungguhnya di pertengahan awal tahun ini rencananya telah disahkan. Melihat hal ini jelas bahwa, berbeda dengan pandangan publik rata-rata, yang menyatakan bahwa RUU PM sekedar hadir atas kepentingan asing belaka: ini adalah perlombaan ekonomi tingkat internasional—di mana pertentangannya *bukanlah* antara korporasi lokal versus korporasi asing, melainkan perjuangan global antara populasi versus korporasi.

Fitur-Fitur dalam RUU PM

Fitur kunci dalam RUU PM ini adalah adanya kemudahan di bidang perpajakan bagi para investor. Investor asing juga akan mendapatkan kemudahan terutama apabila ia berpartner dengan pebisnis lokal. Fasilitas yang memudahkan ini juga ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di area-area pedesaan dan pinggiran, untuk mengembangkan industri-industri inovatif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. RUU PM di sisi lain juga memperbolehkan penggunaan tenaga kerja profesional asing apabila beberapa kemampuan tak ditemukan di kalangan pekerja lokal, juga pemberian kebebasan bagi perusahaan untuk bergerak di sektor ekonomi apapun dan diberikan jaminan bahwa pemerintah tak akan melakukan nasionalisasi.

RUU PM juga sangat permisif dalam soalan akuisisi lahan, di mana ijin penggunaan yang awalnya berjangka 60 tahun akan diperpanjang hingga 95 tahun. Untuk memfasilitasi kesuksesan investasi, pemerintah juga dapat mengarahkan para investor ke dalam Zona Ekonomi Khusus—area di mana birokrasi dan fasilitas disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Hanya industri-industri berkaitan dengan urusan pertahanan yang tertutup bagi para investor, sementara sisanya dibuka luas. Dalam parameter yang luas tersebut, para investor diberi jaminan kemudahan pajak pendapatan, penurunan berbagai bea impor-ekspor bagi mesin-mesin berat dan bahan mentah, serta penurunan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan atau sewa lahan dan bangunan.

Dampak-Dampak

Dengan berbagai aturan seperti yang diterangkan di atas, jelas, bahwa hal tersebut akan mendorong privatisasi besar-besaran di segala bidang, termasuk dalam bidang-bidang yang menunjang kebutuhan hidup mendasar manusia: seperti kepemilikan air bersih dan tanah, dan tentu akan berujung pada komodifikasi di segala bidang (*Pasal 2 Draft RUU PM*).

Berbagai masalah persoalan yang ditimbulkan akibat beroperasinya para investor melalui korporasinya tidak akan dianggap sebagai kejahatan selama hal tersebut dilakukan atas nama pertumbuhan ekonomi; satu-satunya tindak kejahatan korporasi menurut RUU PM adalah apabila korporasi tersebut tidak menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modalnya kepada instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan penanaman modal—dan itupun hanya akan mendapatkan sangsi administratif (*Pasal 18 Draft RUU PM*).

Lanjut ke halaman berikut ☞

Lanjutan dari halaman sebelumnya ☞

Sangat kontras dengan alasan dasar lahirnya RUU PM ini yang memberi fokus bagi ketersediaan lapangan kerja bagi perempuan dan pekerja muda di area-area didirikannya korporasi, persoalan ketenagakerjaan sama sekali tidak menjadi fokus dalam RUU PM ini, ditambah adanya kemudahan untuk meng-gunakan tenaga profesional asing untuk jabatan dan keahlian tertentu (*Pasal 10 Draft RUU PM*); yang tentu mengingat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari standar di negara-negara industri maju, tentu korporasi tak akan memberikan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi penduduk setempat.

Belum lagi pasal-pasal lainnya yang memang pada garis besarnya, hanya menguntungkan para investor, melindungi kepentingan para investor semata. Persis seperti yang dipaparkan oleh Djankov melalui salah satu makalah bulan November 2006 berjudul *The Law and Economics of Self-Dealing* yang diajukan dalam penentuan kebijakan Bank Dunia untuk keperluan penyusunan aturan-aturan hukum yang selanjutnya akan diaplikasikan pada negara-negara seperti Indonesia, khususnya dalam persoalan pemberian perlindungan bagi para investor—yang tak menyoroti sama sekali persoalan perlindungan terhadap para pekerja pada khususnya dan populasi pada umumnya.

Fenomena Global

Tidak hanya di Indonesia, ternyata hukum serupa RUU PM ini juga dipaksakan hadir di negara-negara lain walau dengan nama yang berbeda-beda. Dalam laporan Bank Dunia, *Doing Business 2007*, tercatat Serbia dan Uganda juga telah mulai menerapkan hukum serupa dengan mempermudah aplikasi bagi para investor. Bulgaria telah mengesahkan hukum semacam ini pada bulan April 2006, mengesampingkan protes keras dari penduduknya dan kelompok-kelompok oposisi. Honduras dan Italia telah memindahkan persoalan perijinan dari urusan hukum menjadi urusan badan ekonomi nasional. Bosnia Herzegovina, Republik Czechnia, Romania dan Slovakia yang kini masih menempatkan urusan investasi ini sebagai urusan hukum, tercatat mulai memberikan pembuatan aturan ini pada ekonom-ekonom nasionalnya masing-masing.

Dalam laporan tersebut juga dipaparkan bagaimana di Serbia, yang selama 2 tahun RUU PM mendapat berbagai penolakan, yang juga diperparah dengan dibunuhnya Perdana Menteri Zoran Djindjic yang mendukung kebijakan tersebut, pada akhirnya berhasil disahkan di tahun 2007 ini. Slovakia juga akhirnya berhasil melakukan reformasi bisnis dengan mengesahkan UU serupa yang diperjuangkan sejak Oktober 2003. Selama rentang tahun 2003 hingga 2005, juga tercatat 8 negara melakukannya—Burkina Faso, Kroasia, El Salvador, Guatemala, Lithuania, FYR Makedonia, Portugal dan Ukraina.

Di mana-mana, penentangan terhadap aturan semacam RUU PM ini terjadi. Dan di negara-negara tersebut di atas, kemenangan berada di tangan korporasi. Kini giliran Indonesia, di mana sang pemenang masih belum ditentukan, kesempatan untuk mengalahkan imperium korporasi dalam satu front pertempuran ini masih ada selama RUU PM belum disahkan. Dan itu semua ada di tangan kita sendiri. Hidup kita, masa depan kita dan generasi setelah kita, kini ada di tangan kita sendiri. ★



Sejarah Singkat G8

Diawali tahun 1973 ketika diadakannya pertemuan yang diikuti oleh empat menteri keuangan dari negara AS, Inggris, Prancis, dan Jerman Barat di ruang perpustakaan Gedung Putih (lazim disebut sebagai Library Group), Washington DC. Apa yang dibahas pada saat itu ialah mengenai situasi perekonomian global yang ditengarai menuju krisis—pengangguran, inflasi, dan krisis minyak pertama—sehingga sebagai empat negara kapitalis raksasa mereka berembuk untuk mencari cara keluar dari krisis dan melindungi modal di tengah goncangan ekonomi. Pertemuan ekonomi itu kemudian berkembang menjadi pertemuan rutin yang membentuk G6 (Group of Six) di tahun 1975, dengan mengikutsertakan Italia dan Jepang. Satu tahun kemudian atas desakan AS, Kanada akhirnya masuk dan selanjutnya menjadi G7 (Group of Seven). Masuknya Kanada didasarkan atas sikap antisipasi AS untuk mengimbangi pengaruh kepentingan perekonomian Eropa dalam pengambilan keputusan.

Berakhirnya Perang Dingin dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, dan kemudian berubahnya peran ekonomi Rusia menjadi salah satu kekuatan sistem kapitalisme global. Delegasi Rusia mulai ikut dalam pertemuan G7 ketika diadakannya pertemuan di Napoli tahun 1994. Setelah pertemuan utama pada saat itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan khusus antara delegasi Rusia dengan para pemimpin negara G7. Atas inisiatif Presiden AS, Bill Clinton, tahun 1997 Rusia secara resmi diterima sebagai bagian dari grup tersebut, walaupun pada saat itu Rusia tidak selalu diikutsertakan dalam setiap pertemuan tingkat menteri keuangan, dengan alasan perekonomian Rusia yang belum semaju negara anggota lainnya, sehingga nama grup itu pun masih disebut G7 plus 1. Semakin terintegrasinya Rusia dalam sistem perekonomian kapitalis dengan menanggalkan segala atribut komunisnya, Rusia bisa bersanding sejajar dengan negara-negara kapitalis lainnya, dan mengubah "G7 plus 1" menjadi G8 (Group of Eight) sampai sekarang.

Kelompok G8 (Group of Eight) adalah forum internasional yang beranggotakan Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Delapan negara itu merupakan pemegang kendali atas 65% perekonomian dunia. G8 bukanlah sebuah organisasi formal yang terstruktur seperti IMF ataupun WTO. Penanggung jawab forum G8 berubah setiap tahunnya, untuk tahun 2007 dipegang oleh Jerman, dan mulai Januari 2008, Jepang yang memangku beban penanggung jawab. Forum ini mengadakan berbagai konferensi sepanjang tahun dan penelitian terhadap berbagai kebijakan terutama di bidang ekonomi. Hasil kegiatan tersebut akan digulirkan pada pertemuan pemimpin negara anggota, yang juga menghadirkan perwakilan Uni Eropa. Sejak pertemuan tahun 2005 di Gleneagles, Skotlandia, forum G8 mengadakan pertemuan lain yang berbeda dengan mengikutsertakan 5 negara industri besar lainnya, yakni Cina, India, Mexico, Brazil, dan Afrika Selatan. Pertemuan forum ini sering disebut sebagai "G8 plus 5".

Landasan utama dibentuknya forum G8 ialah agenda pelaksanaan pasar bebas yang diberlakukan di seluruh dunia. Stabilitas ekonomi yang harus terjamin demi terlaksananya pasar bebas menjadi peran utama yang terus diemban oleh setiap anggota dan menjadi agenda pokok dalam setiap pertemuannya. Tidak berbeda dengan IMF atau Bank Dunia, yang menghendaki pertumbuhan ekonomi secara global, forum ini dilandasi oleh hal tersebut namun yang berbeda ialah cukup kentalnya supremasi politik dan negara dalam agenda yang dibawanya. Satu hal yang harus dicatat bahwa dalam setiap pertemuannya, setiap negara membawa agendanya masing-masing dengan kepentingan yang berbeda. Hal ini tentu saja terkait dengan kepentingan ekspansi ekonomi dari setiap negara yang di dalamnya terdapat puluhan perusahaan multinasional bernaung.

Pertemuan G8 ke-33 di Jerman

Tahun ini pertemuan puncak G8 ke-33 mengambil tempat di Kempinski Grand Hotel di kota Heiligendamm wilayah Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Jerman bagian Utara, dari 6 Juni hingga 8 Juni 2007. Heiligendamm adalah sebuah tempat wisata yang dibangun sejak abad ke-18 dan menjadi tempat peristirahatan raja-raja Prusia.

Isu lingkungan hidup, terutama pemanasan global dan pengurangan emisi gas buang, memang menjadi sorotan utama pertemuan G8 kali ini. Pemberian hutang bagi penuntasan kemiskinan di Afrika juga menjadi tujuan utama yang dibahas. Selain itu tentu saja perdagangan bebas dibahas dalam pertemuan ini. Agenda pelaksanaan perdagangan bebas tidak ditulis sebagai agenda utama karena pembahasan tersebut telah menjadi bahasan rutin dan suatu keharusan untuk dibicarakan dalam setiap pertemuan G8 dan pertemuan institusi keuangan internasional lainnya.

Pengurangan emisi CO_2 yang berakibat pada pemanasan global dibahas dalam pertemuan ini. Kanselir Jerman, Angela Mekkel membawa upaya pengurangan emisi dalam agenda penting yang dibicarakan. Ia berusaha membujuk negara-negara industri maju lainnya guna memotong emisi sebesar 50 persen sebelum tahun 2050. Sungguh waktu yang panjang untuk hanya memberi sedikit napas bagi bumi yang kian hari kian memburuk kondisinya. Selain itu ia mengajukan peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar sebesar 20 persen, agar sedikitnya mengurangi pemanasan suhu bumi. Program ini adalah kelanjutan Protokol Kyoto yang melahirkan kesepakatan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang disebabkan industrialisasi yang memakai bahan bakar fosil secara besar-besaran.

Namun pemerintah AS, Bush, menolak untuk mendukung program tersebut, hal ini berkaitan dengan masih terlalu besarnya kepentingan AS di banyak negara ketiga melalui investasi



Bedah Kejahatan Korporasi:

Sejarah Sang Penjahat Perang

"Fasisme seharusnya lebih cocok disebut korporatisme karena ia adalah sebuah gabungan dari negara dan kekuasaan korporasi."
—Benito Mussolini, *pemimpin Fasis Italia*

Bayer AG (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai Bayer saja) adalah sebuah korporasi raksasa asal Jerman yang didirikan pada tahun 1863 di kota Wuppertal, Jerman, oleh seorang pedagang bahan celup, Friedrich Bayer (1825–1880), dan partnernya Johann Friedrich Weskott (18211876). Pada awalnya, Bayer didirikan hanya sebagai pabrik kecil yang bertujuan untuk memanufaktur sekaligus memperdagangkan bahan-bahan celup sintetis. Namun kini Bayer sudah beroperasi di hampir semua negara di dunia dengan perkembangan operasinya yang secara umum terbagi atas empat sektor besar industri, yaitu: kesehatan (farmasi), pertanian (bibit dan *agro-chemicals*), *polymer* (plastik, karet sintetis, *coating*) dan industri kimiawi (materi-materi kimiawi dasar serta materi-materi kimiawi khusus). Bayer di Indonesia bekerja dalam tiga sektor utama: *Health Care, Material Science, dan Crop Science*. Produk-produk Bayer yang dapat kita jumpai di Indonesia kebanyakan adalah produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, di antaranya: Tonikum Bayer®, Aspirin®, Bepanthen®, Canesten®, CDR®, Redoxon® Double Action, Saridon®, Supradyn®, dll.

Sebagai pemain utama dalam empat sektor besar selama lebih dari 125 tahun, Bayer memiliki sejarah yang penuh dengan kontroversi, sebut saja: produksi besar-besaran serta perdagangan atas beberapa jenis obat-obatan yang kemudian menjadi kontroversi (heroin, ciproxin dan baycol); menjadi pengembang senjata kimia dan racun (gas Khlor, gas Mustard, Zyklon B, VX, dll); praktek perbudakan selama Perang Dunia II; serta beberapa kasus keracunan, kematian, efek samping berbahaya dan kerusakan lingkungan akibat limbah dari pabrik-pabrik kimia dan farmasinya. Pada tahun 2001, *Multinational Monitor* mencatat Bayer dalam daftar Sepuluh Perusahaan Terburuk Tahun 2001[1], dan pada tahun 2003 Bayer berhasil menduduki peringkat pertama[2].

Beberapa produk awal Bayer meliputi: Antinonin (pestisida sintetis, 1892), Aspirin (1897), Heroin (1898) dan Buna (karet sintetis, 1915). Selama masa Perang Dunia I, Bayer dan korporasi kimiawi Jerman lainnya mulai tertarik untuk memproduksi senjata kimia[3], di antaranya adalah gas Khlor dan gas Mustard [4].

Bayer dalam Holocaust [5]

Sebagai reaksi atas krisis ekonomi yang melanda Jerman akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I, pada tahun 1925 Bayer bersama beberapa korporasi industri kimia Jerman lainnya seperti BASF, AGFA, Hoechst, Cassella, Chemische Werke Hüls, Chemische Fabrik Kalle, dll, membentuk sebuah sindikat raksasa yang bernama Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG[6] (dalam bahasa Inggris: "*syndicate of dyestuff corporations*". Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai IGF saja). Berkat hubungannya yang sangat dekat dengan rezim *National Socialist* (Nazi), akhirnya IGF mampu memonopoli seluruh produksi bahan-bahan kimiawi di Jerman. Mereka mulai menciptakan sekaligus memproduksi Zyklon B secara besar-besaran. Zyklon B sendiri adalah gas mematikan yang kemudian diujicobakan selama masa Holocaust di dalam kamar-kamar gas pada beberapa kamp konsentrasi, tempat pembantaian atas jutaan tawanan Yahudi [7].

Bukan hanya itu saja, bahkan IGF pun ikut terlibat dalam merancang invasi atas Polandia pada tahun 1939, sebuah invasi yang kemudian memicu terjadinya Perang Dunia II. Di tengah perancangan invasi Jerman-Nazi [8] atas Polandia, IGF bekerja sama dengan para pejabat tinggi Nazi menunjuk lokasi pabrik mana saja yang harus direbut untuk kemudian diserahkan kepada IGF. Timbal baliknya, IGF mengucurkan dana secara besar-besaran kepada militer Nazi. Hal itu merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara Jerman-Nazi dengan IGF. Setelah invasi atas Polandia, Bayer bersama IGF sebagai konglomerasi di bidang kimiawi paling terkemuka di Jerman, mulai memperlebar sayapnya dengan cara merebut pabrik-pabrik kimia yang berada di sepanjang tanah jajahan Nazi di Eropa, dan memberlakukan kerja-paksa di dalam pabrik-pabrik tersebut di bawah pengawalan pasukan Nazi. Pada pintu gerbang setiap pabrik, IGF memasang papan bertuliskan *"kerja akan membebaskanmu"*. Papan tersebut adalah kebohongan pesan-kampanye terbesar dalam sepanjang sejarah manusia, kecuali kita mendefinisikan kata "bebas" sebagai "mati karena lelah".

Bayer dan Auschwitz: Perbudakan

Pada tahun 1940, Jerman-Nazi mulai membangun kamp konsentrasi terbesarnya, kamp Auschwitz, di Polandia Selatan. Komplek kamp konsentrasi tersebut terbagi atas tiga kamp utama: Auschwitz I, kamp yang dibangun pertama kali dan kemudian digunakan untuk berbagai keperluan administratif, sekaligus tempat dimana sebanyak 70.000 tawanan perang Polandia dan Soviet dibunuh. Auschwitz II, kamp pemusnahan utama, dimana setidaknya lebih dari satu juta orang Yahudi, 75.000 orang Polandia dan sekitar 19.000 keturunan *gypsy* dibunuh. Terakhir adalah kamp Monowitz, atau yang biasa dikenal sebagai Auschwitz III, merupakan kamp kerja-paksa yang sepenuhnya dikuasai dan dibangun oleh IGF sendiri. Kamp ini mulai beroperasi pada tahun 1942 [9] ketika IGF membangun pabrik yang bernama *Buna Chemical Plant* untuk memproduksi minyak dan karet sintetis berbahan dasar batu bara disana. Awalnya, pekerja dalam pabrik yang dijaga ketat oleh pasukan SS ini adalah para tawanan Auschwitz I dan II yang dipekerjakan secara paksa, diperbudak sampai mati [10]. Lokasi pembangunan pabrik yang kemudian bertransformasi menjadi Auschwitz III ini dipilih oleh IGF sendiri karena melimpahnya air serta batu bara disana. Tercatat, sebanyak 405.000 tawanan komplek Auschwitz diperbudak di pabrik IGF sejak tahun 1942–1945 , dan tidak satu orangpun yang selamat yang pernah mendapatkan kompensasi dari korporasi-korporasi bekas anggota IGF maupun pemerintah hingga hari ini. Para dokter SS/IGF setiap rentang waktu tertentu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja-budak. Dalam pemeriksaan tersebut, para pekerja-budak yang sakit dan lemah dipisahkan dari yang lain untuk kemudian dibawa ke kamar gas dan disuguhi Zyklon B. Sebanyak 340.000 tawanan binasa akibat eksekusi, pemukulan, kelaparan, dan wabah penyakit.

Bayer dan Auschwitz: Eksperimen Medis atas Manusia

Di seluruh kamp konsentrasi Nazi, terutama di Auschwitz, IGF berkolaborasi dengan Nazi juga melakukan banyak eksperimen medis terhadap manusia [11] atas nama riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Eksperimen-eksperimen yang diawasi sepenuhnya langsung oleh grup Bayer di Auschwitz ini ba-nyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dipro-duksi oleh IGF. Dalam beberapa eksperimen, para tawanan yang dijadikan objek eksperimen disuntik dengan berbagai macam bakteri dan kuman yang diketahui sebagai penyebab dari bera-gam penyakit yang berbeda-beda. Contohnya adalah malaria, yang pada saat itu banyak membunuh tentara Jerman di medan perang. Tujuan eksperimen malaria tersebut adalah untuk meng-uji coba efektivitas obat-obatan buatan IGF yang kemudian akan digunakan oleh pasukan Nazi di medan perang. Selain itu, masih ada juga eksperimen untuk mengatasi penyakit kolera, tifus, hing-ga sakit kuning.

Eksperimen obat-obatan tersebut akan tampak biasa saja apabila kita melihat eksperimen lainnya. Sejak April 1943 hingga Mei 1944, seorang dokter Auschwitz bernama Prof. Dr. Carl Clauberg menguji coba efek dari beberapa cairan keras kimia di dalam rahim dengan cara menyuntikkannya langsung ke dalam rahim para tawanan perempuan. Banyak yang meninggal di tengah-tengah eksperimen ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh seorang dokter Auschwitz lainnya, Dr. Josef Mengele, yang kemudian terkenal dengan sebutan "sang Malaikat Maut". Dr. Mengele sangat terkenal karena eksperimennya terhadap anak-anak kembar dan orang-orang cebol. Seorang mantan tawanan Auschwitz yang berhasil bertahan hidup, Vera Alexander, memberikan kesaksian tentang sepasang anak kembar berumur empat tahun bernama Guido dan Ina. Suatu hari Dr. Mengele membawa mereka, dan mereka kembali dengan keadaan yang sangat mengerikan: kedua tubuh mereka dipersatukan dengan cara dijahit punggungnya, seakan-akan hendak dijadikan kembar siam. Luka mereka terinfeksi dan terus menerus mengeluarkan darah. Mereka menangis dan berteriak-teriak hingga malam. Kemudian mereka dibunuh [12].

Eksperimen Dr. Mengele lainnya termasuk menempatkan tawanan ke dalam ruang bertekanan tinggi; menguji coba berbagai obat-obatan IGF pada para tawanan; merendam tawanan dalam air es selama berjam-jam untuk menguji coba serum anti-beku; eksperimen dengan otopsi, amputasi dan implantasi tanpa bius. Ia juga sangat terkenal dengan risetnya menciptakan manusia ras unggul berambut pirang dan bermata biru. Salah satu caranya adalah dengan cara menyuntikkan beragam bahan kimia ke dalam bola mata anak-anak Yahudi [13]. Seluruh bahan-bahan kimia dan obat-obatan yang digunakan oleh Dr. Mengele dalam setiap eksperimennya adalah buatan langsung dari Bayer dan Hoechst.

Pasca Perang Dunia II

Atas berbagai kejahatannya selama Perang Dunia II, IGF dianggap tidak lagi layak untuk beroperasi. Pada tahun 1945, ditanda tangani sebuah perjanjian, yaitu Kesepakatan Potsdam, menuntut dibubarkannya IGF. Sindikat raksasa ini akhirnya dilikuidasi [14] pada tahun 1951 dan pecah menjadi empat korporasi besar: Bayer, AGFA, BASF, dan Hoechst (sekarang bernama Aventis). Bayer sendiri dibentuk ulang menjadi *Farbenfabriken Bayer AG* dan kemudian mengubah namanya menjadi Bayer AG pada tahun 1972 hingga sekarang.

Pada tanggal 29 Juli 1948, Pengadilan Perang Nurembourg memvonis hukuman penjara atas dua belas eksekutif IGF sebagai penjahat perang, dengan tuduhan keterlibatannya dalam berbagai praktek pembunuhan massal, perbudakan dan berbagai pelanggaran HAM lainnya selama Holocaust. Hukuman penjara terberat yang dijatuhkan oleh pengadilan hanyalah kurungan penjara selama tujuh tahun. Hukuman tersebut dijatuhkan pada Dr. Fritz ter Meer, seorang eksekutif utama sekaligus ilmuwan IGF [15]. Namun, karena besarnya tekanan dari para legislatif sayap kanan Amerika Serikat (yang berargumen bahwa musuh dunia sesungguhnya pada saat itu adalah komunisme, dan bukan para pebisnis Jerman), akhirnya kesemua eksekutif IGF yang dipenjara dibebaskan pada tahun ke-empat masa penahanan [16]. Pada tanggal 1 Agustus 1963, Bayer merayakan hari jadinya yang ke 100 tahun di Gelanggang Cologne, dimana pidato pembukanya dilakukan oleh Dr. Fritz ter Meer sendiri, yang setelah keluar dari penjara langsung menjabat sebagai ketua Dewan Supervisor Bayer [17].

Pada Pengadilan Perang di Nurembourg ini pula, terungkap fakta bahwa seluruh eksperimen medis yang dilakukan selama masa Holocaust adalah hasil inisiatif dari IGF. Salah satu dokter SS/IGF bernama Dr. Hoven, dalam persidangan Nurembourg mengaku "Sudah menjadi rahasia umum, terutama di lingkaran keilmiahan Jerman, bahwa SS tidak memiliki satu orangpun ilmuwan maupun dokter yang cukup terkemuka. Semua eksperimen yang dilakukan di kamp konsentrasi dipersiapkan oleh IGF dan untuk kepentingan IGF. [...] Bukanlah SS, melainkan IGF lah yang memiliki inisiatif untuk menjalankan eksperimen atas manusia di dalam kamp konsentrasi."[18]

Jauh setelah masa Holocaust berakhir, Bayer masih bergerak dalam bisnis senjata kimia, terutama dalam bisnis gas beracun. Setelah Perang Teluk I, PBB menjatuhkan sangsi pada Irak atas penggunaan senjata penghancuran massal yang berbahan dasar gas *neuro-toxin* VX [19]. VX sendiri adalah senyawa kimia buatan Bayer dan telah dipatenkan di Jerman pada tahun 1957 dan di Amerika Serikat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1989 diketahui bahwa Bayer memegang hak paten atas senyawa kimia gas VX yang digunakan oleh militer Amerika Serikat. Menurut pengakuan Bayer, VX adalah bahan dasar yang mereka kembangkan untuk pembuatan pestisida. ★



Catatan Kaki:

[1] Russel Mokhiber dan Robert. Weissman, December 2001. *Corporations Behaving Badly: The Ten Worst Companies of 2001*, Multinational Monitor, hlm 8–19.

[2] Alternet, *http://www.alternet.org/*

[3] F. Haber, 1971. *The Chemical Industry 1900-1930: International Growth and Technological Change,* L, Clarendon Press. Oxford. hlm 209. dan juga *"Bayer: Research, Innovation, and Perseverance"*.

[4] Dietrich Stoltzenberg. March 1997. *Scientist and Industrial Manager: Emil Fischer and Carl Duisberg*, Center for German and European Studies, University of California at Berkeley,. Lihat di *http://www.ciaonet.org/wps/std01*

[5] *"Holocaust"* adalah istilah yang secara umum mengacu pada peristiwa pemusnahan berencana atas enam juta orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II yang dilakukan oleh rezim nasionalis-sosialis Nazi pimpinan Adolf Hitler.

[6] Hermann Levy, 2001. *Industrial Germany: A study of its Monopoly Organisations and their Control by the State,* hlm 65–66.

[7] Antony C. Sutton, 1976. *Wall Street and the Rise of Hitler*. Dalam chapter 2: *"The Empire of IG Farben"*. Lihat juga *Germany: Farben to Create Slave Labor Fund,* Associated Press, 2000.

[8] "Jerman-Nazi" atau *Third Reich*, mengacu pada kekuasaan bangsa Jerman antara tahun 1933–1945 ketika diperintah oleh kediktatoran partai Nazi.

[9] *Anatomy of the Auschwitz Death Camp*, Indiana University Press, 1994, hlm 17.

[10] Laporan personal mengenai bagaimana seorang ahli kimia Yahudi dipekerjakan secara paksa untuk IGF, baca *Surviving Auschwitz* atau oleh Primo Levi.

[11] Brian Ross, 2000. *Headaches for Bayer: Auschwitz Survivor says Pharmaceutical Giant Aided Nazis* oleh Lihat juga *Germany: Farben to Create Slave Labor Fund,* Associated Press, 2000.

[12] Michael Berenbaum. *The World Must Know*, US Holocaust Memorial Museum, hlm 194–195

[13] Marilyn Harran, Louis Weber, 2000. *The Holocaust Chronicles, A History in Words and Pictures*, hlm 384.

[14] Walaupun telah dilikuidasi secara resmi, saham IGF masih tetap diperdagangkan di *Frankfurt Stock Exchange* dan menguasai aset beberapa *real estate* hingga tahun 2003. *http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben*

[15] Winin Pereira and Jeremy Seabrook, 1994 *Global Parasites, Five Hundred Years of Western Culture*, Earthcare Books, hlm 137–138.

[16] Jenny Miller, January, 1992. *Bayer Buys Berkeley*, Z Maga-zine, hlm 23.

[17] *http://boycot.port5.com/foodendrug/food/doc/Hoechst.htm*

[18] *Auschwitz: 60 Year Anniversary: the Role of IG Farben-Bayer,* dalam *http://www.ahrp.org/*

[19] *http://home.earthlink.net/~alto/bayer.html*

